PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANTONIUS YEWIN**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **405001**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 855.000.000**

1. Tanah Seluas 585 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 585 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 8.323 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
6. Tanah Seluas 1.099 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, Rp. 95.000.000
7. Tanah Seluas 20.415 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
8. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 5.000 m2/186 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 152.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA 125 X Tahun 2017, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO GEAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA VARIO 125 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**14.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**900.416.299**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**5.000.000**
	Sub Total	**Rp.**	**1.926.416.299**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**145.000.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.781.416.299**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.